

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019**

Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019

Jl. Raya Transit Cikuasa Pantai, Merak - Cilegon

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Cilegon, 13 Januari 2020
Kepala Balai,

drh. Raden Nurcahyo Nugroho, M.Si
NIP. 19801213 200501 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	5
Ringkasan	6
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	19
B.2. Belanja	20
B.3. Belanja Pegawai	21
B.4. Belanja Barang	22
B.5. Belanja Modal	23
B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23
B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23
B.5.3. Belanja Modal Lainnya	23
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
C.1. Aset Lancar	25
C.1.1. Piutang Bukan Pajak	25
C.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	25
C.1.3. Persediaan	25
C.2. Aset Tetap	26
C.2.1. Tanah	26
C.2.2. Peralatan dan Mesin	26
C.2.3. Gedung dan Bangunan	28
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	28
C.2.5. Aset Tetap Lainnya	28
C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	29
C.3. Aset Lainnya	29
C.3.1. Aset Lain-lain	29
C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	29
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	30
C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga	30
C.5. Ekuitas	31
C.5.1. Ekuitas	31
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	32
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	32
D.2. Beban Pegawai	32
D.3. Beban Persediaan	33
D.4. Beban Barang dan Jasa	34
D.5. Beban Pemeliharaan	34
D.6. Beban Perjalanan Dinas	35
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	35

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	36
D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	36
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	38
E.1. Ekuitas Awal	38
E.2. Surplus/Defisit-LO	38
E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	38
E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	38
E.4. Transaksi Antar Entitas	39
E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan Ke Entitas Lain (DKEL)	39
E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar	39
E.5. Ekuitas Akhir	40
F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	41
F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	41
F.2. Pengungkapan Lain-lain	41

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Cilegon, 13 Januari 2020
Kepala Balai,

drh. Raden Nurcahyo Nugroho, M.Si
NIP. 19801213 200501 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp11.475.900.354,00 atau mencapai 109,56% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp10.474.075.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp16.442.181.868,00 atau mencapai 99,99% dari alokasi anggaran sebesar Rp16.443.561.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp22.117.134.799,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp315.635.440,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp21.801.499.359,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp34.618.867,00 dan Rp22.082.515.932,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp11.512.549.149,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp15.596.512.756,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-4.083.963.607,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp-429.712,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-4.084.393.319,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp21.124.686.170,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-4.084.393.319,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp470.067,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp5.041.753.014,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp22.082.515.932,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II CILEGON
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019			31 Desember 2018
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	10.474.075.000,00	11.475.900.354,00	109,56	11.920.815.847,00
Jumlah Pendapatan		10.474.075.000,00	11.475.900.354,00	109,56	11.920.815.847,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	5.303.668.000,00	5.302.796.411,00	99,98	4.765.018.034,00
Belanja Barang	B.4.	8.099.016.000,00	8.098.519.757,00	99,99	6.910.286.509,00
Belanja Modal	B.5.	3.040.877.000,00	3.040.865.700,00	100,00	1.865.146.409,00
Jumlah Belanja		16.443.561.000,00	16.442.181.868,00	99,99	13.540.450.952,00

II. NERACA

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II CILEGON
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.	58.066.633,00	8.319.355,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	-290.333,00	-41.597,00
Persediaan	C.1.3.	257.859.140,00	363.659.560,00
Jumlah Aset Lancar		315.635.440,00	371.937.318,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	8.520.392.000,00	8.520.392.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	16.552.478.413,00	14.546.303.713,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	8.791.213.585,00	8.284.071.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	528.348.600,00	528.348.600,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	16.500.000,00	16.500.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-12.607.433.239,00	-11.106.618.894,00
Jumlah Aset Tetap		21.801.499.359,00	20.788.996.419,00
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.3.1.	84.550.000,00	24.700.000,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	-84.550.000,00	-24.700.000,00
Jumlah Aset Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Aset		22.117.134.799,00	21.160.933.737,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	34.618.867,00	36.247.567,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		34.618.867,00	36.247.567,00
Jumlah Kewajiban		34.618.867,00	36.247.567,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	22.082.515.932,00	21.124.686.170,00
Jumlah Ekuitas		22.082.515.932,00	21.124.686.170,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		22.117.134.799,00	21.160.933.737,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II CILEGON
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	11.512.549.149,00	11.865.135.203,00
JUMLAH PENDAPATAN		11.512.549.149,00	11.865.135.203,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	5.302.262.891,00	4.751.011.554,00
Beban Persediaan	D.3.	984.115.703,00	789.536.764,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	3.681.854.646,00	2.776.303.202,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	745.531.522,00	877.535.821,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	2.855.904.846,00	2.515.148.688,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	2.026.594.412,00	1.741.909.110,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	248.736,00	41.597,00
JUMLAH BEBAN		15.596.512.756,00	13.451.486.736,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-4.083.963.607,00	-1.586.351.533,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	160.000,00	63.999.999,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	25.979.170,00	2.454.920,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	26.568.882,00	37.207.880,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-429.712,00	29.247.039,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-4.084.393.319,00	-1.557.104.494,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II CILEGON
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	E.1.	21.124.686.170,00	21.547.320.568,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-4.084.393.319,00	-1.557.104.494,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	470.067,00	-128.371.083,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.1.	470.067,00	-128.371.083,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	5.041.753.014,00	1.262.841.179,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	22.082.515.932,00	21.124.686.170,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon

Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan.

Visi, Misi dan Kebijakan Mutu

VISI

“Menjadi Unit Pelaksana Teknis yang Tangguh dan Terpercaya dalam Pemberian Pelayanan Karantina Hewan dan Tumbuhan serta Keamanan Hayati Hewani dan Nabati”

MISI

1. Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan;
3. Memberikan jaminan kesehatan terhadap media pembawa yang dilalulintaskan;
4. Memfasilitasi perdagangan dan mendukung akses pasar komoditas pertanian;
5. Meningkatkan citra karantina pertanian dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

KEBIJAKAN MUTU

Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon, berkomitmen menjadi UPT yang tangguh dan terpercaya dalam pemberian pelayanan karantina hewan dan tumbuhan serta keamanan hayati hewani dan nabati melalui :

1. Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewani dan nabati dari masuk, keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)
2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan
3. Memberikan jaminan kesehatan terhadap media pembawa yang dilalulintaskan
4. Memfasilitasi perdagangan dan mendukung akses pasar komoditas pertanian
5. Meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana
6. Memelihara, meninjau dan melakukan penyesuaian Sistem Manajemen Mutu untuk peningkatan berkelanjutan untuk kepuasan pelanggan
7. Memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari

pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal Hingga Revisi Ke-06. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	4.105.950.000,00	10.114.075.000,00
Pendapatan Jasa Lainnya	100.000.000,00	360.000.000,00
Jumlah Pendapatan	4.205.950.000,00	10.474.075.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.126.519.000,00	4.289.364.000,00
Belanja Lembur	933.984.000,00	1.014.304.000,00
Belanja Barang Operasional	1.778.045.000,00	2.108.226.000,00
Belanja Barang Non Operasional	458.477.000,00	553.392.000,00
Belanja Barang Persediaan	677.699.000,00	814.160.000,00
Belanja Jasa	880.700.000,00	1.021.749.000,00
Belanja Pemeliharaan	1.013.760.000,00	745.554.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.104.312.000,00	2.855.935.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	638.900.000,00	2.531.489.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	546.000.000,00	509.388.000,00
Jumlah Belanja	13.158.396.000,00	16.443.561.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp11.475.900.354,00 atau mencapai 109,56% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp10.474.075.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2019

Akun Pendapatan	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0,00	160.000,00	0,00
Pendapatan Denda	0,00	2.850.263,00	0,00

Akun Pendapatan	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Jasa Lainnya	360.000.000,00	800.960.400,00	222,49
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	10.114.075.000,00	10.658.991.208,00	105,39
Pendapatan Lain-lain	0,00	12.938.483,00	0,00
Jumlah	10.474.075.000,00	11.475.900.354,00	109,56

Realisasi Pendapatan TA 2019 mengalami penurunan sebesar -3,73% dibandingkan TA 2018. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	160.000,00	63.999.999,00	-99,75
Pendapatan Denda	2.850.263,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	800.960.400,00	1.109.646.800,00	-27,82
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	10.658.991.208,00	10.747.169.048,00	-0,82
Pendapatan Lain-lain	12.938.483,00	0,00	0,00
Jumlah	11.475.900.354,00	11.920.815.847,00	-3,73

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp16.442.181.868,00 atau 99,99% dari anggaran belanja sebesar Rp16.443.561.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2019

Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	5.303.668.000,00	5.303.660.626,00	100,00
Belanja Barang	8.099.016.000,00	8.098.519.757,00	99,99
Belanja Modal	3.040.877.000,00	3.040.865.700,00	100,00
Total Belanja Kotor	16.443.561.000,00	16.443.046.083,00	100,00
Pengembalian Belanja		-864.215,00	0,00
Total Belanja	16.443.561.000,00	16.442.181.868,00	99,99

Dibandingkan dengan Tahun 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 21,43% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kenaikan Belanja Pegawai secara Umum karena adanya Kenaikan Besaran Gaji Pokok PNS tahun 2019
2. Kenaikan Standar Biaya Umum 2019
3. Adanya Penambahan Anggaran dari APBN-P dalam rangka mendukung peningkatan Pelayanan Karantina

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Belanja Pegawai	5.302.796.411,00	4.765.018.034,00	11,29
Belanja Barang	8.098.519.757,00	6.910.286.509,00	17,20
Belanja Modal	3.040.865.700,00	1.865.146.409,00	63,04
Total Belanja	16.442.181.868,00	13.540.450.952,00	21,43

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.302.796.411,00 dan Rp4.765.018.034,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 11,29% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya Kenaikan Gaji PNS sesuai Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil atau PNS
2. Adanya Kenaikan Pangkat 17 Orang Pegawai dan KGB 29 Orang Pegawai

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.289.356.626,00	3.970.551.544,00	8,03
Belanja Lembur	1.014.304.000,00	795.367.000,00	27,53
Jumlah Belanja Kotor	5.303.660.626,00	4.765.918.544,00	11,28
Pengembalian Belanja Pegawai	-864.215,00	-900.510,00	-4,03
Jumlah Belanja	5.302.796.411,00	4.765.018.034,00	11,29

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp8.098.519.757,00 dan Rp6.910.286.509,00. Realisasi belanja barang TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 17,20% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Kenaikan Standar Biaya Umum tahun 2019
2. Adanya Penambahan Kegiatan terutama untuk Peningkatan Kapasitas SDM Pegawai

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	2.108.220.293,00	1.680.383.079,00	25,46
Belanja Barang Non Operasional	553.339.373,00	363.957.742,00	52,03
Belanja Barang Persediaan	814.133.563,00	743.938.350,00	9,44
Belanja Jasa	1.021.390.160,00	729.322.829,00	40,05
Belanja Pemeliharaan	745.531.522,00	877.535.821,00	-15,04
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.855.904.846,00	2.515.148.688,00	13,55
Jumlah Belanja Kotor	8.098.519.757,00	6.910.286.509,00	17,20
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	8.098.519.757,00	6.910.286.509,00	17,20

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.040.865.700,00 dan Rp1.865.146.409,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 63,04% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya Penambahan Belanja Modal Bulan Agustus dan Oktober 2019 dari APBN-P
2. Adanya Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Sarana dan Fasilitas Perkantoran untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.531.484.700,00	1.645.268.236,00	53,86
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	509.381.000,00	200.000.000,00	154,69
Belanja Modal Lainnya	0,00	19.878.173,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	3.040.865.700,00	1.865.146.409,00	63,04
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	3.040.865.700,00	1.865.146.409,00	63,04

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.531.484.700,00 dan Rp1.645.268.236,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 53,86% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Adanya Pengadaan 6 Unit Kendaraan dinas Roda 4
2. Pengadaan Alat Laboratorium, Alat Pengolah data dan Fasilitas Perkantoran Lainnya

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.531.484.700,00	1.645.268.236,00	53,86
Jumlah Belanja Kotor	2.531.484.700,00	1.645.268.236,00	53,86
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	2.531.484.700,00	1.645.268.236,00	53,86

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp509.381.000,00 dan Rp200.000.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 154,69% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Pekerjaan Rehab Ruang Renovasi seluas 160 M2
2. Pekerjaan Pembuatan 2 Toilet dalam Gedung

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	509.381.000,00	200.000.000,00	154,69
Jumlah Belanja Kotor	509.381.000,00	200.000.000,00	154,69
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	509.381.000,00	200.000.000,00	154,69

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp58.066.633,00 dan Rp8.319.355,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	58.066.633,00	8.319.355,00
Jumlah	58.066.633,00	8.319.355,00

C.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-290.333,00 dan Rp-41.597,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan 2019
Lancar	Rp58.066.633,00	0,5%	Rp-290.333,00

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan 2018
Lancar	Rp8.319.355,00	0,5%	Rp-41.597,00.

C.1.3. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp257.859.140,00 dan Rp363.659.560,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan

per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Barang Konsumsi	257.859.140,00	363.659.560,00
Jumlah	257.859.140,00	363.659.560,00

Mutasi nilai Persediaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember 2018	363,659,560.00
Mutasi Tambah	
Pembelian	814,133,563.00
Transfer Masuk	75,702,500.00
Koreksi Tambah	3,336,762.00
Koreksi Penyesuaian Persediaan	6,665,570.00
Mutasi Kurang	
Pembelian	- 984,115,703.00
Transfer Keluar	- 231,000.00
Barang Usang	- 21,292,112.00
Saldo per 31 Desember 2019	257,859,140.00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp8.520.392.000,00 dan Rp8.520.392.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp16.552.478.413,00 dan Rp14.546.303.713,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	14.546.303.713,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	2.004.184.700,00
Pengembangan Nilai Aset	44.683.000,00
Pengembangan Melalui KDP	482.617.000,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-84.550.000,00
Transfer Keluar	-440.760.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	16.552.478.413,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-11.590.328.404,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	4.962.150.009,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut:

a. Mutasi tambah Peralatan dan Mesin:

1. Pembelian sebesar Rp2.004.184.700,00 adalah atas Pengadaan Alat Laboratorium, Alat Pengolah data, 6 Unit Kendaraan Dinas R-4 dan Fasilitas Perkantoran Lainnya. Rincian yang dicatat dari Pembelian adalah sebagai berikut:

No	PERALATAN DAN MESIN	VOL	SAT	NILAI ASET
1	Portable Generating Set	1	Unit	47,300,000
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6	Unit	1,489,500,000
3	Mesin Penghitung Uang	1	Buah	5,000,000
4	CCTV - Camera Control Television System	16	Buah	26,398,400
5	Mesin Absensi	2	Buah	10,000,000
6	Meja Kerja Kayu	4	Buah	45,169,000
7	Kursi Besi/Metal	1	Buah	25,397,300
8	Meja Rapat	1	Buah	16,945,600
9	Meja Resepsionis	1	Buah	54,000,000
10	Lemari Es	1	Buah	4,500,000
11	A.C. Split	10	Buah	60,000,000
12	Karpet	1	Buah	14,674,400
13	Kamera Udara	1	Buah	22,700,000
14	Handphone Encryption	1	Buah	26,000,000
15	Microscope Dengan Camera	1	Buah	103,343,000
16	Micro Pippettes	1	Buah	5,757,000
17	TV Monitor	2	Buah	4,600,000
18	Multichannel Pipet	1	unit	15,900,000
19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	Buah	27,000,000
	TOTAL	61		2,004,184,700

2. Pengembangan Nilai Aset Rp44.683.000,00 adalah Penambahan 'Touch Screen Remote' untuk Mikroskop KT Senilai Rp13.783.000,00, Software Server Rp.11.200.000,00, Aksesori Kendaraan R-4 senilai Rp.10.500.000,00 dan Biaya Instalasi Genset Sebesar Rp.9.200.000,00
3. Pengembangan melalui KDP sebesar Rp482.617.000,00 adalah Penambahan Lensa untuk Mikroskop. Nilai penambahan terdiri dari Kontrak Pengadaan dan Biaya Administrasi Pengadaan.

b. Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin:

1. Transfer Keluar senilai Rp440.760.000,00 Berupa 3 Unit Mobil (1 Unit Ke BKP Kelas I Pontianak dan 2 Unit Ke BKP Kelas I Pekan Baru)
2. Penghentian 6 Unit Motor Kondisi Rusak Berat untuk diusulkan Penghapusan

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp8.791.213.585,00 dan Rp8.284.071.000,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	8.284.071.000,00
Mutasi Tambah	
Pengembangan Nilai Aset	45.888.000,00
Pengembangan Melalui KDP	463.493.000,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-2.238.415,00
Saldo per 31 Desember 2019	8.791.213.585,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-618.952.015,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	8.172.261.570,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. **Penambahan** dari Pengembangan yaitu atas Pekerjaan Pembuatan 2 Toilet dalam Gedung senilai Rp.45.888.000,00
2. **Penambahan** dari Pengembangan melalui KDP adalah Pekerjaan Rehab Ruang Pelayanan terdiri dari Kontrak Pekerjaan Rehab Ruang Pelayanan seluas 160M2, Biaya Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas serta Biaya Perjadin dan Honor Pokja dengan Total senilai Rp463.493.000,00
3. **Mutasi Kurang** senilai Rp2.238.415,00 adalah dari Pengembalian Belanja Modal TAYL (hasil audit pekerjaan Renovasi Ruang Rapat TA 2018). Atas pengembalian belanja tersebut berdampak kepada pengurangan aset dan dicatat melalui Koreksi Pencatatan Nilai.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp528.348.600,00 dan Rp528.348.600,00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp16.500.000,00 dan Rp16.500.000,00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-12.607.433.239,00 dan Rp-11.106.618.894,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	16.552.478.413,00	-11.590.328.404,00	4.962.150.009,00
2.	Gedung dan Bangunan	8.791.213.585,00	-618.952.015,00	8.172.261.570,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	528.348.600,00	-48.612.710,00	479.735.890,00
4.	Aset Tetap Lainnya	16.500.000,00	-16.500.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		25.888.540.598,00	-12.607.433.239,00	13.281.107.359,00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp84.550.000,00 dan Rp24.700.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	24.700.000,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	84.550.000,00
Mutasi Kurang	
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	-24.700.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	84.550.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-84.550.000,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	0,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

1. **Mutasi Penambahan** dari Reklasifikasi senilai Rp84.550.000 adalah dari Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 6 Unit Kendaraan Bermotor yang diajukan Proses Penghapusan.
2. **Mutasi pengurangan** Aset Lain-lain adalah Usulan Penghapusan BMN tahun lalu yang telah selesai sesuai Risalah Lelang Nomor 116/22/2019 tanggal 09 April 2019.

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-84.550.000,00 dan Rp-24.700.000,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	84.550.000,00	-84.550.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		84.550.000,00	-84.550.000,00	0,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp34.618.867,00 dan Rp36.247.567,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0,00	533.520,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	34.618.867,00	35.714.047,00
Jumlah	34.618.867,00	36.247.567,00

Utang kepada Pihak Ketiga periode 31 Desember 2018 pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon telah selesai dibayarkan seluruhnya pada Bulan Januari 2019. Sedangkan Utang kepada Pihak Ketiga periode 31 Desember 2019 pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon adalah Tagihan Pemakaian Listrik PLN dan Telepon Telkom 2019 yang belum dibayar. Terhadap Utang tersebut telah dilakukan Jurnal Penyesuaian sesuai Memo Penyesuaian terlampir

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp22.082.515.932,00 dan Rp21.124.686.170,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp11.512.549.149,00 dan Rp11.865.135.203,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	2.850.263,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	10.708.738.486,00	10.755.488.403,00	-0,43
Pendapatan Jasa Lainnya	800.960.400,00	1.109.646.800,00	-27,82
Jumlah	11.512.549.149,00	11.865.135.203,00	-2,97

- Pendapatan Jasa Karantina adalah Pendapatan dari Tugas dan Fungsi Karantina yaitu atas Jasa Pemeriksaan dan Sertifikasi Kesehatan Hewan dan Tumbuhan.
- Pendapatan Jasa Lainnya adalah dari Biaya Perjalanan Dinas Pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Karantina sesuai PP 35 Tahun 2016.
- Pendapatan Denda adalah atas 5 hari keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Rehab Ruang Pelayanan sebesar 5 permil dari Nilai Kontrak. Denda tersebut dipotong langsung dari Pengajuan SPM.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.302.262.891,00 dan Rp4.751.011.554,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	2.913.934.320,00	2.658.552.500,00	9,61
Beban Pembulatan Gaji PNS	48.725,00	48.790,00	-0,13

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Anak PNS	66.126.066,00	64.535.580,00	2,46
Beban Tunj. Beras PNS	176.125.440,00	174.341.700,00	1,02
Beban Tunj. Fungsional PNS	418.970.000,00	384.630.000,00	8,93
Beban Tunj. PPh PNS	6.048.900,00	3.312.854,00	82,59
Beban Tunj. Struktural PNS	33.810.000,00	34.300.000,00	-1,43
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	247.818.440,00	225.874.130,00	9,72
Beban Tunjangan Umum PNS	39.210.000,00	38.830.000,00	0,98
Beban Uang Lembur	1.014.304.000,00	795.367.000,00	27,53
Beban Uang Makan PNS	385.867.000,00	371.219.000,00	3,95
Jumlah	5.302.262.891,00	4.751.011.554,00	11,60

Dari total Beban Pegawai Tahun 2019 sebesar Rp5.302.262.891,00 telah memperhitungkan Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp5.302.796.411,00 dikurangi Beban tahun yang lalu sebesar Rp533.520 (yaitu Kekurangan Gaji TA 2018 yang belum dibayar a.n Suwirda). Pada Aplikasi SAIBA telah dilakukan Jurnal penyesuaian sesuai Memo Penyesuaian terlampir

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp984.115.703,00 dan Rp789.536.764,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	984.115.703,00	789.536.764,00	24,64
Jumlah	984.115.703,00	789.536.764,00	24,64

Beban Persediaan adalah beban dari Pemakaian Barang persediaan selama tahun 2019.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.681.854.646,00 dan Rp2.776.303.202,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0,00	900.386,00	-100,00
Beban Bahan	512.799.373,00	329.610.242,00	55,58
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	234.370.000,00	211.800.000,00	10,66
Beban Honor Output Kegiatan	40.540.000,00	34.347.500,00	18,03
Beban Jasa Lainnya	131.488.200,00	77.437.896,00	69,80
Beban Jasa Profesi	212.943.000,00	29.100.000,00	631,76
Beban Keperluan Perkantoran	1.548.655.293,00	1.146.983.079,00	35,02
Beban Langganan Air	14.400.000,00	16.250.000,00	-11,38
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	175.066.278,00	161.382.194,00	8,48
Beban Langganan Listrik	378.460.929,00	371.205.501,00	1,95
Beban Langganan Telepon	8.213.173,00	9.511.404,00	-13,65
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	319.195.000,00	319.200.000,00	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.000.000,00	2.400.000,00	150,00
Beban Sewa	99.723.400,00	66.175.000,00	50,70
Jumlah	3.681.854.646,00	2.776.303.202,00	32,62

Beban Langganan Listrik, Telepon dan Langganan daya Jasa Lainnya telah memperhitungkan Realisasi belanja Barang dan Jasa 2019 dikurangi Pembayaran Beban Tahun 2018 yaitu sebesar Rp35.714.047,00 dan Beban Langganan Listrik dan Telepon Tahun 2019 yang belum dibayar yaitu sebesar Rp34.618.867,00

Pada Aplikasi SAIBA telah dilakukan Jurnal penyesuaiannya sesuai Memo Penyesuaian terlampir

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp745.531.522,00 dan Rp877.535.821,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	187.683.386,00	254.471.354,00	-26,25
Beban Pemeliharaan Jaringan	23.999.500,00	44.999.050,00	-46,67
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	490.317.710,00	515.469.117,00	-4,88
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.530.926,00	62.596.300,00	-30,46
Jumlah	745.531.522,00	877.535.821,00	-15,04

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.855.904.846,00 dan Rp2.515.148.688,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	935.368.227,00	854.437.352,00	9,47
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	61.500.000,00	32.198.700,00	91,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	24.250.000,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.057.187.721,00	574.111.250,00	84,14
Beban Perjalanan Tetap	777.598.898,00	1.054.401.386,00	-26,25
Jumlah	2.855.904.846,00	2.515.148.688,00	13,55

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.026.594.412,00 dan Rp1.741.909.110,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Software	0,00	1.561.000,00	-100,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	198.465.919,00	189.480.162,00	4,74
Beban Penyusutan Irigasi	4.718.622,00	21.708.122,00	-78,26
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	49.788.222,00	143.569.222,00	-65,32
Beban Penyusutan Jaringan	1.131.540,00	1.131.540,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.772.490.109,00	1.384.459.064,00	28,03
Jumlah	2.026.594.412,00	1.741.909.110,00	16,34

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp248.736,00 dan Rp41.597,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang PNBPN	248.736,00	41.597,00	497,97
Jumlah	248.736,00	41.597,00	497,97

Penyisihan Piutang PNBPN adalah perhitungan 0,5 % dari Nilai Piutang karena masuk dalam Kategori Lancar. Telah dilakukan Jurnal sesuai Memo Penyesuaian.

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-5.276.770,00	-3.101.020,00	70,16

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	-21.292.112,00	-34.106.860,00	-37,57
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	15.279.102,00	2.454.920,00	522,39
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	160.000,00	63.999.999,00	-99,75
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.565.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	9.135.068,00	0,00	0,00
Jumlah	-429.712,00	29.247.039,00	-101,47

- Beban Penyesuaian Nilai Persediaan adalah perubahan penyesuaian harga persediaan yang turun sesuai harga pembelian terakhir selama periode Tahun 2019.
- Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan adalah penyesuaian kenaikan harga persediaan sesuai harga pembelian terakhir.
- Kerugian Persediaan Rusak/Usang adalah Pemusnahan dokumen yang sudah tidak berlaku.
- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya senilai Rp160.000,00 adalah atas penjualan aset berupa bongkaran sesuai Risalah Lelang Nomor: 116/22/2019 tanggal 09 April 2019
- Penerimaan Kembali dari Belanja TAYL merupakan pendapatan atas audit Itjen.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp21.124.686.170,00 dan Rp21.547.320.568,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp-4.084.393.319,00 dan Rp-1.557.104.494,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp470.067,00 dan Rp-128.371.083,00.

E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp470.067,00 dan Rp-128.371.083,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	470.067,00
Gedung dan Bangunan	-2.238.415,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	2.238.415,00
Pengembalian Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	2.238.415,00
Jumlah	470.067,00

Transaksi yang menyebabkan Koreksi ini berasal dari Koreksi Pencatatan Nilai BMN karena adanya Pengembalian Belanja Modal TAYL (pekerjaan Renovasi Ruang Rapat) sebesar Rp2.238.415,00 dan perhitungan kembali Nilai Penyusutannya yaitu sebesar Rp470.067,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.041.753.014,00 dan Rp1.262.841.179,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Ditagihkan ke Entitas Lain	16.442.181.868,00
Diterima dari Entitas Lain	-11.475.900.354,00
Transfer Keluar	-231.000,00
Transfer Masuk	75.702.500,00
Jumlah	5.041.753.014,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2019 saldo DDEL adalah sebesar Rp-11.475.900.354,00 sedangkan DKEL sebesar Rp16.442.181.868,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp75.702.500,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2019.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Barang Konsumsi (Formulir Sertifikat Utama)	SEKRETARIAT BADAN KARANTINA PERTANIAN	75.702.500,00
Jumlah			75.702.500,00

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp-231.000,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Keluar per 31 Desember 2019.

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin (Berupa 2 Unit Mobil)	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PEKANBARU	-265.760.000,00
2.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PEKANBARU	265.760.000,00
3.	Barang Konsumsi Formulir Sertifikat Karantina	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDAR LAMPUNG	-231.000,00
4.	Peralatan dan Mesin (1 Unit Mobil)	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PONTIANAK	-175.000.000,00
5.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PONTIANAK	175.000.000,00
Jumlah			-231.000,00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp22.082.515.932,00 dan Rp21.124.686.170,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Rekonsiliasi Eksternal antara Data SAI dan SiAP telah dilakukan melalui portal <http://e-rekon-lk.djpbk.kemenkeu.go.id> dengan hasil Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: BAR- 169156 /WPB.10/KP.020/2019 tanggal 10 Januari 2020.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

LK Tahun 2019 ini telah disusun menggunakan:

- ✓ Aplikasi SAIBA versi 19.0.2 tanggal rilis 8 Juli 2019
- ✓ Aplikasi Simak-BMN Versi 19.1
- ✓ Aplikasi Persediaan Versi 19.0.1
- ✓ E-Rekon LK-G2 : Erekon Version: 2.1.37